

SKRIPSI

**PENENTUAN LOKASI POTENSIAL PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI KASUS: KECAMATAN WARU DAN WARU TIMUR
DI KOTA PALOPO)**

Disusun dan diajukan oleh

**AMRU
D521 16 012**



**DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**PENENTUAN LOKASI POTENSIAL PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI KASUS: KECAMATAN WARU DAN WARU TIMUR
DI KOTA PALOPO)**

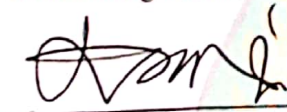
Disusun dan diajukan oleh

**AMRU
D52116012**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas
Teknik Universitas Hasanuddin
pada tanggal
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT
NIP. 196330504 1995112 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001

Ketua Proram Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasvid, S.T., M.Si
NIP. 1974006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Amru

NIM : D521 16 012

Departemen : Perencanaan Wilayah da Kota

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Penentuan Lokasi Potensial Pedagang Kaki Lima Di Kota Palopo (Studi Kasus: Kecamatan Wara Dan Wara Timur)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 April 2021

Yang Menyatakan


Amru

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dari segenap hati, penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan rahmat-Nya sehingga penyusunan laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW sebagai panutan hidup, beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan tugas akhir ini sebagai syarat akademis penyelesaian studi jenjang Strata 1 program studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddi. Sebuah proses tanpa kesalahan ibarat kehidupan tanpa dosa. Kesalahan ini mutlak adanya namun atas berkat petunjuk Allah SWT yang diwujudkan dengan usaha dan kerja keras serta bimbingan dan arahan berbagai pihak maka laporan tugas akhir yang berjudul **“Penentuan Lokasi Potensial Pedagang Kaki Lima Di Kota Palopo (Studi Kasus: Kecamatan Wara Dan Wara Timur)”** dapat diselesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun terlepas dari semua itu, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini dan penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, harapan penulis semogakarya ini dapat bermanfaat demi kemajuan ilmu pengetahuan dan semoga Allah SWT meridhoi segala usaha yang telah dilakukan. *Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.*

Makassar, 14 Januari 2021



Amru

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Lingkup Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Sektor Informal	8
2.1.1 Pengertian Sektor Informal	8
2.1.2 Ciri-ciri Sektor Informal	10
2.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima	12
2.3 Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima	14
2.3.1 Jenis Dagangan PKL	19
2.3.2 Bentuk Sarana Perdagangan PKL	20
2.3.3 Pola Penyebaran PKL	21
2.3.4 Pola Pelayanan PKL	23
2.3.5 Dampak Penataan Ruang Terhadap Adanya PKL	26
2.4 Tinjauan Aspek Penentu Lokasi PKL	27

2.5 Kebijakan Penataan PKL	31
2.6 Penelitian Terdahulu Mengenai Upaya Penataan PKL	36
2.7 Kerangka Pikir Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Populasi dan Sampel	42
3.2.1 Populasi.....	42
3.2.2 Sampel.....	42
3.3 Lokasi Penelitian.....	43
3.4 Jenis Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5.1 Data Primer	45
3.5.2 Data Sekunder.....	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
3.6.1 Tujuan Penelitian Pertama	47
3.6.2 Tujuan Penelitian Kedua.....	47
3.6.3 Tujuan Penelitian Ketiga.....	48
3.7 Variabel Penelitian.....	49
3.8 Alur Pikir Penelitian	52
BAB IV GAMBARAN UMUM	54
4.1 Gambaran Umum Kota Palopo	54
4.1.1 Kondisi Geografis.....	54
4.1.2 Kependudukan	56
4.1.3 Topografi	56
4.1.4 Iklim.....	58
4.1.5 Ketenagakerjaan	59
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Wara Timur	60
4.2.1 Kondisi Geografis	60
4.2.2 Kependudukan	60
4.3 Gambaran Umum Kecamatan Wara	61
4.3.1 Kondisi Geografis	61

4.3.2 Kependudukan	61
4.4 Kondisi Pedagang Kaki Lima di Lokasi Penelitian	61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
5.1 Analisis Karakteristik PKL di Kota Palopo	65
5.1.1 Jenis Barang Dagangan.....	65
5.1.2 Sarana Dagang	66
5.1.3 Pendidikan.....	67
5.1.4 Modal Usaha	68
5.1.5 Penghasilan	69
5.1.6 Luas Lapak.....	71
5.1.7 Pola Pelayanan	72
5.1.8 Pola Penyebaran.....	73
5.1.8 Waktu Berdagang.....	74
5.2 Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Palopo	75
5.2.1 Penentuan Kriteria.....	75
5.2.2 Penilaian Perbandingan(<i>Comparative Judgement</i>).....	76
5.2.3 Penilaian Bobot Prioritas	77
5.2.4 Konsistensi Logis (<i>Logical Consistency</i>).....	79
5.2.5 Pengambilan Keputusan.....	79
5.3 Analisis Arahan Penentuan Lokasi Potensial Pedagang Kaki Lima Yang Optimal di Kota Palopo.....	79
5.3.1 Faktor Pendukung	82
5.3.2 Faktor Penghambat	97
5.3.3 Hasil Penilaian dan Arahan Lokasi Potensial PKL.....	105
5.3.4 Arahan Model Pengembangan PKL	110
BAB VI PENUTUP	114
6.1 Kesimpulan	114
6.2 Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	117

CURRICULUM VITAE	120
Lampiran	121

**PENENTUAN LOKASI POTENSIAL PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI KASUS: KECAMATAN WARU DAN WARU
DI KOTA PALOPO TIMUR)**

Amru¹⁾, Arifuddin Akil²⁾, Mimi Arifin²⁾

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: amruamru99@gmail.com

ABSTRAK

PKL adalah bagian dari aktivitas ekonomi pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan PKL di Kota Palopo yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakteraturan tata kota. Pemerintah Kota Palopo telah membuat suatu program dengan prinsip memberdayakan sektor informal khususnya PKL untuk melakukan aktivitasnya dalam suatu lokasi tertentu dengan tetap menjaga ketertiban dan kebersihan terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengidentifikasi karakteristik PKL di Kota Palopo; 2) Menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan lokasi PKL di Kota Palopo; 3) Merumuskan arahan penentuan lokasi potensial PKL yang optimal di Kota Palopo. Identifikasi karakteristik PKL dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun untuk menentukan faktor yang berpengaruh menggunakan *Analytical Hierarchy Proses* (AHP). Penentuan lokasi potensial PKL yang dilakukan menggunakan analisis *Grid Based* dengan *grid* berukuran 25 meter x 25 meter. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa karakteristik yang mendukung dalam penentuan lokasi pedagang kaki lima seperti penghasilan, pola pelayanan, pola penyebaran, pendidikan, usia, serta waktu berdagang. Selain itu, ditemukan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penentuan lokasi PKL yakni aksesibilitas, pendapatan, fasilitas publik, sarana dan prasarana, ketersediaan lahan parkir, dekat dengan kawasan permukiman serta daya tarik lokasi. Hasil analisis penentuan lokasi potensial PKL pada Kota Palopo tersebar di beberapa titik. Adapun hasil tersebut diklasifikasi menjadi lima tingkatan yaitu sangat tidak potensial dengan jumlah *grid* 7015, tidak potensial dengan jumlah *grid* 4583, cukup potensial dengan jumlah *grid* 3577, potensial dengan jumlah *grid* 637, sangat potensial dengan jumlah *grid* 327.

Kata Kunci: Penentuan, Potensial, Pedagang, Kaki Lima, Kota Palopo

¹⁾ Mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

²⁾ Dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

**DETERMINING POTENTIAL LOCATION FOR STREET VENDORS
(CASE STUDY: WARA AND WARA DISTRICT IN EAST
PALOPO CITY)**

**Amru¹⁾, Arifuddin Akil²⁾, Mimi Arifin²⁾
Hasanuddin University, Indonesia**

Email: amruamru99@gmail.com

ABSTRACT

Street vendors are part of economic activities in the informal sector. The rapid growth of street vendors in Palopo City without proper handling can result in disorganized urban planning. The Palopo City Government has created a program with the principle of empowering the informal sector, especially street vendors, to carry out their activities in a certain location while maintaining order and cleanliness to the environment. This study aims to 1) identify the characteristics of street vendors in Palopo City; 2) Determine supporting and inhibiting factors in determining the location of street vendors in Palopo City; 3) Formulate directions for determining the optimal potential location of street vendors in Palopo City. The identification of street vendor characteristics was carried out by means of qualitative descriptive analysis. As for determining the influencing factors using Analytical Hierarchy Process (AHP). Determination of potential street vendors using analysis grid based with a grid measuring 25 meters x 25 meters. The results of this study found several characteristics that support the location of the street vendors, such as income, service patterns, distribution patterns, education, age, and trading time. In addition, several factors were found that influenced the determination of the location of street vendors, namely accessibility, income, public facilities, facilities and infrastructure, availability of parking space, proximity to residential areas and location attractiveness. The results of the analysis of determining the potential location of street vendors in Palopo City are scattered in several points. The results are classified into five levels, namely very potential with the number of grids 7015, not potential with the number of grids 4583, potential enough with the number of grids 3577, potential with the number of grids 637, very potential with the number of grids 327.

Keywords: *Determination, Potential, Traders, Street Vendors, Palopo City*

¹⁾ *Student of the Department of Regional and Urban Planning, Faculty of Engineering, Hasanuddin University*

²⁾ *Lecturer at the Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Hasanuddin University*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan dari sesuatu kondisi yang kurang baik ke arah yang lebih baik atau pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari suatu kondisi nasional ke kondisi nasional yang lain yang harus dinilai lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pembangunan mengandung berbagai makna baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya yang semuanya mengandung arti masing-masing. Pembangunan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan nasional yang bersifat integral dan komprehensif.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dari masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan dengan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh moral dan etikanya. Pelaksanaan pembangunan baik yang bersifat nasional maupun lokal regional harus tetap memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup. Hal tersebut sangat penting mengingat kelangsungan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pembangunan, sehingga saat ini muncul konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga sumber daya alam yang ada tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Berkaitan dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup, maka dalam setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan tata ruang bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang dimaksud adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota. Pengertian tata ruang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktural dan pola ruang.

Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional maupun lokal, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur konsep penataan ruang bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan fungsi tanah. Pengertian penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat baik di desa maupun di kota, itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk serta terbatasnya peluang kerja, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada pekerjaan sektor informal atau usaha mikro yang biasanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Perencanaan pembangunan dan penataan kota secara ideal harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Dikemukakan oleh Eko Budihardjo bahwa dalam suatu masyarakat negara berkembang yang sarat dengan perubahan, perencanaan kota sebaiknya merupakan latar yang mampu secara kenyal mewadahi perubahan fungsi dan tuntutan kebutuhan serta perilaku penduduk kotanya. Pada kenyataannya perencanaan pembangunan dan penataan kota seringkali mengabaikan pergerakan aktivitas penduduk kota yang dinamis, sehingga perencanaan pembangunan dan penataan kota yang telah dibuat menjadi usang dan tidak mampu mengatasi perkembangan ekonomi masyarakat yang demikian cepat.

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat baik di desa maupun di kota, itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk serta terbatasnya peluang kerja, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada pekerjaan sektor

informal atau usaha mikro yang biasanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Banyak jumlah penduduk pada kawasan perkotaan membuat kebutuhan akan barang dan jasa ikut meningkat sedangkan harga-harga barang dan jasa pada toko-toko besar menjadi semakin mahal sehingga keberadaan pedagang kaki lima menjadi sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Perkembangan pembangunan kota tidak dapat lepas dari keberadaan para pelaku ekonomi. Pedagang kaki lima saat ini keberadaanya sangat dilematis. Munculnya pedagang kaki lima di sudut kota telah menimbulkan masalah baru dan menyulitkan pemerintah kota dalam melakukan penataan. Pedagang kaki lima banyak yang berjualan pada tempat yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan kesemrawutan.

Dengan demikian, merebaknya jumlah pedagang kaki lima bukan semata-mata karena keinginan para pedagang saja untuk memperoleh pendapatan (*push factors*), tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa para pedagang kaki lima (*pull factors*). Disamping itu, jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan (*positive spillovers*) seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah serta menjadi alternative terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima memiliki sisi positif dan juga sisi negatif sehingga membuat pemerintah menjadi dilema dalam mengatasi keberadaan para pedagang kaki lima yang menjamur. Disatu sisi, keberadaan para pedagang kaki lima sebagai penyangga dalam perekonomian karena merupakan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja yang tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja sektor formal yang seharusnya disediakan sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Namun di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima juga dapat menimbulkan masalah lain berupa kebersihan, kerapian, dan ketertiban kota yang terganggu akibat adanya para pedagang kaki lima yang sering dianggap kotor, kumuh, dan

tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan yang tidak diinginkan oleh pemerintah dalam menata kotanya.

Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, Kota Palopo dalam perkembangannya juga mengalami masalah dengan keberadaan PKL. Aktivitas pedagang kaki lima tumbuh dan berkembang dengan pesat di setiap kawasan-kawasan fungsional perkotaan. Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Palopo yang belum tertata dengan baik menimbulkan masalah yang cukup serius dalam pembangunan perkotaan. Masalah yang ditimbulkan oleh PKL seperti penggunaan ruang publik oleh PKL yang tidak sesuai dengan fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri, PKL membuat penataan kota menjadi kacau, keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yang menekankan aspek kebersihan, keindahan serta kerapihan kota, pencemaran lingkungan, menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Di sisi lain keberadaan PKL di Kota Palopo yang tidak sejalan dengan perencanaan tata ruang, telah menjadi beban bagi ruang tersebut. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik massa dan ruang kawasan dalam menciptakan keserasian lingkungan sering kali tidak sejalan sehingga menyebabkan kesumpekan. Selain itu, secara tidak langsung keberadaan PKL di Kota Palopo menjadi alasan banyaknya sampah yang berserakan yang menciptakan kesan jorok di Kota Palopo. Lemahnya aspek pengelolaan, pembinaan, pengawasan pedagang kaki lima menjadi salah satu faktor yang membuat berkembang pesatnya pedagang kaki lima di kota Palopo.

Pemerintah Kota Palopo melalui Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah berupaya mengatur tempat-tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan serta mengadakan program pembinaan untuk pedagang kaki lima dan asongan akan tetapi belum berjalan secara maksimal. Selain itu, dengan belum teraturnya lokasi-lokasi PKL yang terkait dengan fungsi ruang perkotaan, akan menyebabkan ketidakefisienan pelayanan kota dalam hal transportasi kota, penggunaan prasarana kota, serta dampak pencemaran lingkungan.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul'' Penentuan Lokasi Potensial Pedagang Kaki Lima Di Kota Palopo''

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik pedagang kaki lima di Kota Palopo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penentuan lokasi Pedagang kaki lima di Kota Palopo?
3. Bagaimana arahan penentuan lokasi potensial pedagang kaki lima di Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut ialah

1. Mengidentifikasi karakteristik pedagang kaki lima di Kota Palopo.
2. Menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan lokasi pedagang kaki lima di Kota Palopo.
3. Merumuskan arahan penentuan lokasi potensial pedagang kaki lima di Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui hasil analisis yang telah dilakukan maupun hasil dari temuan studi dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh beberapa manfaat yang berguna. Di antaranya untuk ilmu perencanaan wilayah dan kota, pemerintah dan instansi terkait serta pihak-pihak lain secara umum yang tertarik oleh tema penelitian ini serta kepada peneliti secara pribadi. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberi masukan studi mengenai arahan penataan, pengendalian kegiatan dan pemanfaatan ruang pada pedagang kaki lima secara objektif, dan termasuk dalam substansi ilmu perencanaan tata guna lahan perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Palopo sebagai regulator atau pembuat kebijakan terkait pentingnya penataan dan pengendalian lokasi pedagang kaki lima dalam mendukung perkembangan sektor informal sebagai penggerak perekonomian rakyat.

1.5 Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian terdiri dari lingkup substansi dan lingkup wilayah penelitian. Lingkup substansi terkait dengan hal-hal yang akan dibahas dalam laporan penelitian, sedangkan lingkup wilayah merujuk pada batasan wilayah penelitian.

1. Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian berada di Kota Palopo tepatnya pada lokasi yang menggambarkan pusat kota serta pusat perdagangan bagi pedagang kaki lima, lokasi penelitian terfokus di Kecamatan Wara dan Wara timur.

2. Lingkup Substansi

Penelitian ini membahas mengenai karakteristik PKL dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penentuan lokasi PKL di Kota Palopo. Hal mengenai PKL yang di bahas adalah jenis dagangan, jam operasional, sarana dagangnya, pola layanan, pola sebarannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi PKL (sarana dan prasarana, aksesibilitas, keamanan dan kenyamanan, estetika lingkungan, perizinan, status lahan dan modal usaha).

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan laporan ini akan dibahas dan diuraikan menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan permasalahan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah studi dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang hasil studi literatur yang berupa dasar-dasar teori dan referensi yang terkait dengan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini akan membahas tentang

karakteristik pedagang kaki lima serta kriteria dalam penataan pedagang kaki lima.

BAB III Metodologi Penelitian

Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, variable penelitian dan tahapan penelitian.

BAB IV Gambaran Umum

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang menjelaskan secara umum gambaran tentang lokasi penelitian.

BAB V Hasil Dan Pembahasan

Berisi tentang hasil pengamatan atau pengumpulan data dan informasi lapangan, pengolahan data dan informasi, serta memuat analisis dan pembahasan data/informasi serta pembahasan hasil analisis.

BAB VI Penutup

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga berisi saran untuk kajian lanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sektor Informal

2.1.1 Pengertian Sektor Informal

Gagasan sektor informal dilontarkan pertama kali oleh seorang antropolog asal Inggris yaitu Keith Hart(1971) setelah melakukan penelitian kegiatan penduduk di kota Accra dan Nima, Ghana. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang terorganisir. Dikatakan diluar pasar karena sektor ini termasuk kelompok yang tidak permanen atau tidak ada jaminan tentang keberlangsungan pekerjaan yang dimilikinya Kelompok informal menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan ketrampilan terbatas dan dilakukan oleh anggota keluarga.

Istilah sektor informal semakin populer setelah ILO (*International Labour Organization*) melakukan penelitian di Kenya dan kemudian melanjutkan penelitiannya tersebut ke negara-negara berkembang lainnya. Menurut Simanjuntak (2017:37) keberadaan pedagang sektor informal kadang-kadang terlupakan, sehingga pada setiap kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi praktis, sektor informal sering terlupakan. Sebenarnya pedagang kaki lima ini biasa dipakai sebagai penarik wisatawan dari mancanegara.

Menurut Fuad (2015) menjelaskan bahwa sektor informal dapat dilihat sebagai bentuk kegiatan perekonomian atau sebagai wadah penampung angkatan kerja, meskipun pendapatan yang diperoleh pekerja tidak menentu dan pada umumnya relatif kecil, namun sektor informal dapat berperan sebagai katup pengaman masalah ketenagakerjaan di Indonesia maupun Negara – negara yang sedang berkembang lainnya.

Jan Bremen (dalam Manning dan Effendi, 1996: 138-140) memperjelas pengertian sektor informal dengan menyatakan bahwa sektor informal menunjukkan fenomena perbedaan dua kegiatan yang mempunyai ciri-ciri yang berlawanan. Tenaga kerja formal adalah yang bergaji dalam suatu pekerjaan yang

permanen. Sifat semacam ini biasanya dimiliki oleh kegiatan yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang terjalin dengan organisasi yang baik. Pada umumnya mereka yang terikat dalam kontrak kerja kelompok ini mempunyai syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum. Di lain pihak, mereka yang berada di luar kelompok ini dinamakan sektor informal. Sektor informal merupakan manifestasi dari situasi pertumbuhan ekonomi negara sedang berkembang karena mereka yang masuk sektor ini bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan (Santhurahman, 2005:29).

Studi mendalam tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter-Evers, yang menganalogikan sektor ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Ekonomi bayangan digambarkan sebagai berbagai kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan ini merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam unit-unit kecil sehingga bisa dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat subsistem yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang ada di lingkungan sektor informal

Sektor informal adalah unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah dan sektor yang belum mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Kriteria adanya *accessibility* terhadap suatu fasilitas yang disediakan pemerintah adalah yang dipakai sebagai ukuran untuk membedakan usaha sektor formal dan informal. Sektor informal muncul ke permukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisir.

Sektor yang utamanya diisi oleh golongan yang kurang mampu ini terlihat makin menjamur di negara-negara sedang berkembang. Karena kegiatannya dipandang ilegal, maka para pengamat menamakan kegiatan ini sebagai kegiatan ekonomi bawah tanah atau sering disebut *underground economy*. Dari beberapa penjelasan mengenai sektor informal diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor informal merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas hukum,

pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, dan dalam aktivitasnya tidak diperlukan ketrampilan khusus.

2.1.2 Ciri-ciri Sektor Informal

Ciri – ciri sektor informal menurut Fuad (2015), adalah jumlah barang sedikit dengan mutu rendah, modal sangat terbatas, teknik operasinya masih tradisional, kesempatan kerja yang elastis, terdapat banyak tenaga kerja yang tidak diberi upah, pemberian kredit terjadi secara pribadi, serta ketergantungannya terhadap faktor – faktor eksternal relatif rendah.

Dari pengertian dan ciri - ciri sektor informal yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri – ciri sektor informal adalah sebagai berikut :

1. Tidak memerlukan izin usaha
2. Modal yang dimiliki terbatas dan padat karya
3. Sektor informal adalah unit usaha dengan pola kegiatan tidak teratur dengan manajemen yang sederhana
4. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan sederhana
5. Jumlah produksi terbatas dan produksinya berkualitas rendah jika dibandingkan sektor formal
6. Tidak memandang tingkat pendidikan dan tidak membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan usahanya
7. Penghasilan yang diperoleh tidak menentu
8. Pada umumnya satuan usahanya mempekerjakan tenaga kerja dari kalangan keluarga dan jika menerima pekerja hanya berdasarkan kepercayaan
9. Status pekerja tidak tetap artinya bukan merupakan karyawan atau pekerja tetap dengan kontrak kerja tertentu
10. Mudah keluar masuk usaha dan dapat beralih ke usaha lain, dan
11. Kurang mendapat dukungan dari pemerintah

Sektor informal dapat dilihat sebagai bentuk kegiatan perekonomian atau sebagai wadah penampung angkatan kerja, meskipun pendapatan yang diperoleh pekerja tidak menentu dan pada umumnya relatif kecil, namun sektor informal dapat

berperan sebagai katup pengaman masalah ketenagakerjaan di Indonesia maupun Negara – negara yang sedang berkembang lainnya.

Menurut Simanjuntak (2017:37) keberadaan pedagang sektor informal kadang-kadang terlupakan, sehingga pada setiap kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi praktis, sektor informal sering terlupakan. Sebenarnya pedagang kaki lima ini biasa dipakai sebagai penarik wisatawan dari mancanegara.

Ciri khas pasar sektor informal, yaitu:

1. Mudah di masuki
2. Fleksibel (waktu dan tempat beroperasinya)
3. Bergantung pada sumber daya lokal
4. Skala operasinya yang kecil

Menurut Todaro (2000: 351-352) ciri-ciri sektor informal disebutkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar memiliki produksi yang berskala kecil, aktifitas-aktifitas jasa dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana.
2. Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal.
3. Produktifitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah daripada di sektor formal.
4. Para pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak dan jaminan pensiun.
5. Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal.
6. Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat bertahan hidup dan bukannya untuk mendapatkan keuntungan, dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan.

7. Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan dan meskipun begitu mereka bekerja dengan waktu yang panjang.
8. Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum area*) dan permukiman liar (*schelter*) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan.

Menurut Wirosardjono (dalam Fuad, 2015:27) ciri-ciri sektor informal disebutkan antara lain:

1. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaan.
2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kegiatannya sering dikatakan “liar”.
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
4. Tidak mempunyai tempat tetap.
5. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
6. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga.
7. Umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
8. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya.

2.2 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan daya tarik tersendiri bagi sebuah kota. Demikian pula dari sudut budaya, pedagang kaki lima menjadi pengemban budaya bahkan menjadi model budaya kota tertentu. Melalui pedagang kaki lima, karya-karya budaya diperkenalkan kepada masyarakat. Selain itu, pedagang kaki lima merupakan gejala budaya bagi sebuah kota dan menciptakan berbagai corak budaya tersendiri (Simanjuntak, 2013: 221).

Adapun definisi pedagang kaki lima menurut Agus winoto (2017) adalah *“The People who offer goods or services for sale from public places, primarily streetes and pavement”*. Yang berarti orang yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual dari tempat-tempat umum, terutama jalan-jalan dan trotoar. Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas.

Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal.

Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar 5 *feet* atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop (Fakultas Ekonomi Unpar, 1980, dalam Widodo, 2000: 27).

Namun pengertian tentang pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi di setiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk (Fakultas Teknik Unpar, 1980, dalam Sari, 2003: 27). Mc. Gee dan Yeung (1977: 25) memberikan pengertian pedagang kaki lima sama dengan hawker, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

2.3 Karakteristik Aktivitas PKL

Mc Gee dan Yeung (1977) mengemukakan karakteristik PKL dibagi berdasar barang dagangan, jenis ruang usaha, dan jenis sarana usaha :

- a. Jenis dagangan PKL dipengaruhi oleh aktivitas utama yang ada disekitar kawasan dimana PKL tersebut beraktivitas.
- b. Jenis dagangan yang dijual antara lain : bahan mentah makanan, makanan setengah jadi, non makanan dan jasa pelayanan.
- c. Lokasi berdagangnya berada dipinggir jalan ataupun tempat-tempat yang seiring dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar, terminal serta daerah komersil.
- d. Sifat usahanya terdiri dari sarana non permanen, semi permanen dan permanen. Secara umum sarana yang digunakan yaitu gerobak, pikulan, warung semi permanen, kios atau gelaran alas.

Karakteristik PKL dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk. (1980), yaitu :

- a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen.
- b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu ada yang berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang)
- c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi dari jerih payahnya
- e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relative rendah dan biasanya tidak berstandar.
- f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pemebeli ummunya merupakan pembeli yang berdaya beli.
- g. Usaha kecil biasanya berupa *family enterprise*, dimana ibu dan anak-anakturut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- h. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri khas pada usaha pedagang kaki lima.

- i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan secara musiman.
- j. Barang yang dijual biasanya merupakan *convience goods* jarang sekali *speciality goods*.
- k. Seringkali dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah.

Menurut Wirosandjoyo (1985) PKL tergolong sektor informal. Sektor informal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan), yang memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Pola kegiatannya tidak teratur, baik waktu, pemodalan dan penerimaan.
- b. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya kecil, dan diusahakan berdasarkan hitungan harian.
- c. Umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya
- d. Tidak memiliki keterkaitan usaha yang lain yang besar
- e. Umumnya dilakukan oleh dan melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- f. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan dan keterampilan kerja
- g. Umumnya tiap-tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari kerabat keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama
- h. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan dan perkreditan formal

Rustianingsih, (2004) mengungkapkan pengaturan maupun pengarahan PKL harus mempertimbangkan karakteristik PKL (setting perilaku), karakteristik konsumen PKL maupun karakteristik ruang fisik PKL (setting fisik). Karakteristik PKL adalah pemahaman terhadap perilaku dari masyarakat PKL dengan indikasi sebagai berikut :

- a. Fungsi kegiatan : fungsi pelayanan pedagang eceran, fungsi pelayanan jasa, fungsi hiburan, dan fungsi sosial ekonomi

- b. Tingkat pendidikan : indikasi ini memperlihatkan kepada kita terhadap tingkat pemahaman masyarakat PKL dalam mencerna suatu pola kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
- c. Jenis dagangan : indikasi ini memperlihatkan kepada kita terhadap ada tidaknya mayoritas dan minoritas atau keragaman dari kegiatan PKL, juga memperlihatkan sarana dan prasarana yang dipakai dalam berdagang. Hal ini mempermudah kita untuk pengaturan ruangnya.
- d. Lamanya berprofesi indikasi ini memperlihatkan asal muasal mereka terlibat pada kegiatan PKL.
- e. Tingkat pendapatan PKL : indikasi ini memperlihatkan kondisi bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan PKL di suatu lokasi maka terjadi kecenderungan kawasan tersebut akan menjadi sasaran utama PKL yang biasanya berdekatan dengan lokasi formal.
- f. Model yang diinginkan PKL : indikasi ini memperlihatkan keinginan PKL terhadap model penataan
- g. Interaksi sesama PKL : indikasi yang memperlihatkan tingkat solidaritas sesama PKL
- h. Kebutuhan ruang PKL : indikasi yang memperlihatkan terhadap kebutuhan lahan untuk masing-masing jenis dagangan.

Karakteristik ruang fisik PKL Rustianingsih (2004) adalah kebutuhan elemen analisis untuk menentukan syarat-syarat utama yang harus dipenuhi dalam menyediakan ruang bagi kegiatan PKL. Karakteristik umum yang mempengaruhi kebutuhan ruang bagi PKL adalah ;

- a. Lokasi yang strategis
- b. Aksesibilitas yang tinggi

Dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, menurut Malik (2005), Palupi dan Raharjo (2004) dan Indrawati (2005), PKL diklasifikasikan menjadi :

1. Berdasarkan latar belakang ekonominya, klasifikasi pertama adalah PKL yang benar-benar terpaksa menjadi PKL karena kesulitan hidup. Mereka berdagang dengan warung beroda (dorongan) ataupun bangunan semi permanen di Trotoar. Sembari berdagang mereka juga bertempat tinggal disitu, karena tidak ada tempat lain lagi untuk dijadikan tempat tinggal.

Kedua, PKL yang berdagang karena masalah ekonomi juga namun mereka telah memiliki tempat tinggal dan simbol hidup modern seperti TV misalnya. Ketiga, PKL yang berdagang karena melihat potensi keuntungan yang jauh lebih besar dari pada membuka toko/warung disbanding harus menyewanya. Selain itu harus mudah diakses pembeli.

2. Berdasarkan jenis makanan yang dijual terdiri dari PKL penjual makanan, pakaian, kelontong, peralatan bekas (klitikan) dan sebagainya.
3. Berdasarkan waktu berdagang pada pagi hingga siang hari, pagi hingga sore, sore hingga malam hari, malam hari hingga pagi hari, pagi hingga malam hari dan sepanjang hari.
4. Berdasarkan bangunan tempat berdagang. Dapat diklasifikasikan menjadi PKL bergerak/movable/dorongan, PKL tanpa bangunan seperti PKL oprokan/dasaran/gelaran, PKL dengan bangunan permanen (selalu ada setiap saat, baik bentuknya masih tetap ataupun sudah berubah), PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).
5. Berdasarkan luas bangunan/tempat berdagang (*space use*), terdiri dari 7 kelompok yaitu PKL dengan luasan 1-3m², 4-6 m², 7-9 m², 10-12 m², 13-15 m², 16-17 m², dan lebih dari 18 m².

Tabel 2.1 Kajian Teori karakteristik PKL

Sumber	Aspek yang terdapat dalam Teori
Mc Gee dan Young (1977)	• Jenis barang yang diperdagangkan • Keberadaan lokasi berdagang • Sifat usaha berdagang • Sarana yang digunakan dalam berdagang
Kartono dkk (1980)	• Jenis pedagang • Lokasi • Jenis barang yang diperdagangkan • Modal usaha • Kualitas barang • Interaksi pedagang • Sifat kegiatan usaha • Psikologis pedagang
Wirosandjoyo (1985)	• Sarana yang digunakan • Lokasi usaha • Jangkauan pelayanan • Keterampilan

Sumber	Aspek yang terdapat dalam Teori
	• Tenaga kerja
Rustianingsih (2004)	• Fungsi kegiatan • Tingkat pendidikan • Jenis barang yang diperdagangkan • Pendapatan • Interaksi • Kebutuhan ruang (lokasi)
Malik(2005), Palupi (2004), Indrawati(2005)	• Latar belakang ekonomi • Sarana berdagang • Barang yang diperdagangkan • Waktu berdagang • Kondisi bangunan • Luas bangunan

Sumber : Hasil kajian literature, 2021

Berdasarkan pada kajian yang telah disebutkan oleh para pakar diatas, dapat ditentukan aspek yang dapat membentuk karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL). Aspek tersebut di kelompokkan berdasarkan aspek fisik, aspek kegiatan dan psikologi pedagang. Dari ketiga aspek tersebut kemudian ditentukan indikatornya. Aspek dan indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Aspek dan Indikator

Aspek	Indikator	Variabel
Aspek Fisik	• Menjual barang dalam skala kecil	• Jenis barang
	• Usaha bermodal kecil	• Pendapatan modal usaha
	• Bentuk tempat berdagang	• Saranan yang digunakan
	• Keterbatasan cara berdagang	• Tingkat pendidikan • Tingkat keterampilan
	• Tenaga kerja	• Sumber tenaga kerja
	• Kebutuhan ruang	• Luas lapak • Status lapak
Aspek Kegiatan	• Pedagang yang menetap dan berpindah-pindah	• Sifat berdagang • Waktu berdagang • Fungsi berdagang • Interaksi pedagang
Aspek Psikologis	• Adanya Penertiban dari Satpol PP	• Suasana psikologis PKL

Aspek	Indikator	Variabel
	Kondisi Ekonomi	Latar belakang menjadi PKL

Sumber : Hasil kajian literature, 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh indikator dari ketiga aspek, yaitu aspek fisik dengan indikator : hanya menjual barang murah, usaha bermodal kecil, bentuk tempat berdagang, keterbatasan cara berdagang, tenaga kerja, dan kebutuhan ruang, untuk aspek kegiatan diperoleh inidikator yaitu pedagang yang menetap dan berpindah-pindah dan interaksi pedagang. Dari aspek Psikologis diperoleh indikator berupa adanya penertiban dari Satpol PP dan Kondisi ekonomi. Berdasarkan indikator pada Tabel 2.2 diperoleh variabel dari tabel hasil tinjauan teori yang meliputi karakteristik fisik berupa : jenis barang, sarana yang digunakan, pendapatan, modal usaha, Tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, sumber tenaga kerja, luas lapak dan status lapak. Dari aspek kegiatan PKL meliputi : fungsi kegiatan usaha, sifat kegiatan usaha, waktu kegiatan usaha dan adanya tawar menawar. Dari aspek psikologi PKL meliputi suasana psikologis dan latar belakang menjadi PKL.

2.3.1 Jenis Dagangan PKL

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83), jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain. Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama , yaitu:

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
2. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
3. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
4. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut dan lain sebagainya.

2.3.2 Bentuk Sarana Perdagangan PKL

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe (1973, dalam Widjajanti, 2000: 39-40) adalah sebagai berikut:

1. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
2. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
4. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).

5. Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.



Gambar 2.1 Berbagai macam bentuk dan sarana dagang pkl

sumber: survey lapangan

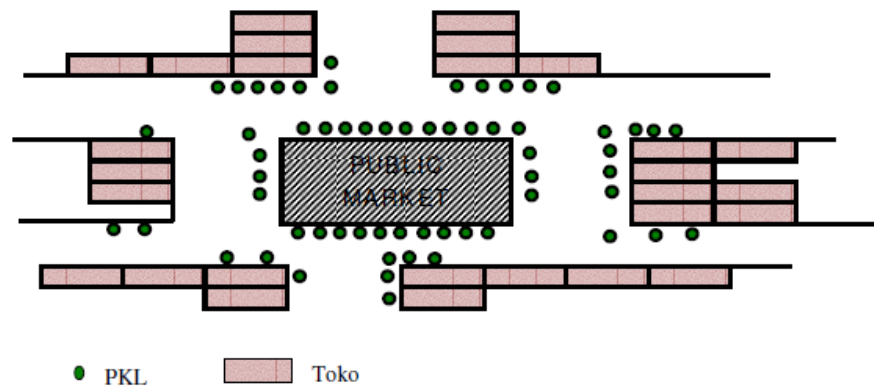
2.3.3 Pola penyebaran PKL

Berdasarkan pola penyebarannya, aktivitas PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 36-37) dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, yaitu:

1. Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*)

Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Selain itu pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya merupakan lokasilokasi

yang banyak diminati oleh sektor ini. Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokkan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau saling menunjang. Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan minuman.

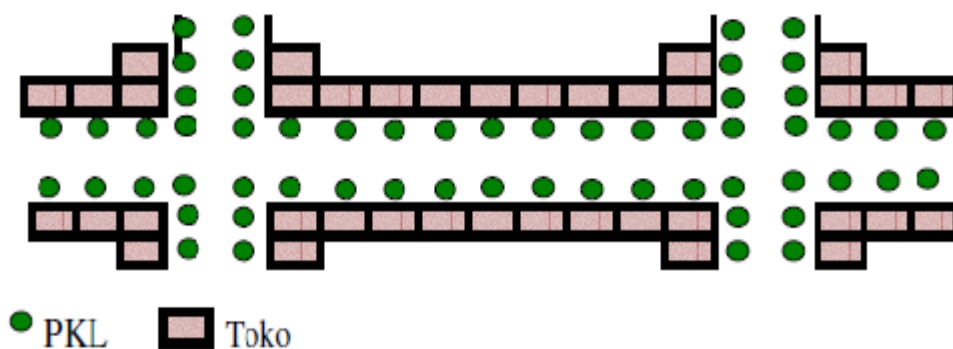


Gambar 2.2 Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*)

Sumber: Mc. Gee dan Yeung (1977:37)

2. Pola Penyebaran Memanjang (*Linier Concentration*)

Pada umumnya pola penyebaran memanjang atau linier concentration terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama (main street) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Dengan kata lain pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen. Jenis komoditi yang biasa diperdagangkan adalah pakaian, kelontong, jasa reparasi, buah-buahan, rokok/obat-obatan, dan lain-lain.



Gambar 2.3 Pola Penyebaran Memanjang (*Linier Concentration*)

Sumber: Mc. Gee dan Yeung (1977:37)

2.3.4 Pola Pelayanan Aktivitas PKL

Pola pelayanan menurut Yeung (1977) dalam Simanjuntak (2013:221), adalah cara berlokasi aktivitas pedagang kaki lima dalam memanfaatkan ruang kegiatannya sebagai tempat usaha. Pola pelayanan pedagang kaki lima ini juga erat kaitannya dengan sarana fisik dagangan pedagang kaki lima yang digunakan dan jenis usahanya. Misalnya, pedagang kaki lima menetap, jenis dagangannya bukan kebutuhan primer dan sarana fisik dagangan berupa kios, gerobak beratap dan meja. Serta jenis pola pelayanan (tetap, semi menetap, dan tidak menetap) ini juga dipengaruhi waktu, tempat lokasi berdagang pedagang kaki lima.

a. Sifat Pelayanan PKL

Berdasarkan sifat pelayanannya, PKL menurut Mc. Gee dan Yeung(1977: 82) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pedagang menetap (static).

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap.

2. Pedagang semi menetap (semi *static*).

Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayanan seperti ini adalah adanya pergerakan PKL yang menetap pada suatu lokasi pada periode tertentu, setelah waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari). Adapun sarana fisik yang dipergunakan untuk berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap.

3. Pedagang keliling (mobile)

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil.

Aktivitas PKL dalam kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa. Dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan mereka adalah kereta dorong dan pikulan/keranjang.



Gambar 2.4 Sifat Pelayanan PKL
Sumber survey lapangan

b. Golongan pengguna jasa PKL

Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas jasa PKL pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relative lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. Sedangkan bagi golongan berpendapatan tinggi ada kecenderungan untuk tidak mengunjungi lokasi aktivitas PKL, terutama untuk jenis barang dagangan bukan makanan. Pertimbangannya adalah dari segi kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal

kualitas barang, dan sebagainya, sehingga golongan ini lebih memilih untuk berbelanja di toko atau supermarket. Selain alasan tersebut, dari sisi psikologis ada kecenderungan gaya hidup masyarakat kota yang selalu ingin menjaga gengsi, sehingga mereka lebih percaya diri apabila berbelanja di tempat-tempat yang dapat mewakili status mereka. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendatangi lokasi aktivitas perdagangan sektor informal, tetapi ini terjadi sekali waktu atau bersifat insidental.

Rachbini dan Hamid (1994: 92) menyatakan bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah. Kondisi ini juga menunjukkan adanya hubungan antara sektor formal dan informal.

c. Skala Pelayanan Aktivitas PKL

Skala pelayanan suatu aktivitas jasa pedagang sektor informal dapat diketahui dari asal pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa tersebut, maka skala pelayanan semakin besar (Manning dan Effendi, 1996: 366-372).

d. Waktu Pelayanan Aktivitas PKL

Mc Gee dan Yeung (1977: 76) menyatakan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Temuan ini didasarkan pada penelitiannya terhadap “hawkers” di kota-kota Asia Tenggara. Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi jasa terhadap pusat-pusat kegiatan disekitarnya. Saat teramai bagi aktivitas pedagang sektor

informal di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan wisata, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan sebagainya.

2.3.5 Dampak Penataan Ruang Terhadap Adanya Pedagang Kaki Lima

Sektor formal yang tumbuh dan berkembang di perkotaan dapat menarik minat para pedagang sektor informal untuk ikut andil dalam keteraturan kota yang ada, sebagai contoh, kegiatan industri, perdagangan dan jasa formal serta perumahan, selain itu, dilengkapi dengan prasarana lingkungan perkotaan berupa jalan dan berbagai sarana lainnya, menarik berbagai kegiatan lain yang saling terkait dengan kegiatan perkotaan tersebut. Keadaan tersebut dapat dilihat dari tumbuhnya sektor informal terutama pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan pendukung kegiatan sektor formal tersebut. Keberadaan pedagang kaki lima yang selalu menempati ruang publik, terutama di trotoar jalan, bahu jalan, taman, dan tempat parkir telah mengakibatkan konflik kepentingan di ruang publik tersebut.

Sebagai aktivitas pendukung, keberadaan pedagang kaki lima tidak terlepas dari keberadaan sektor formal. Hal ini dapat dilihat dari interaksi ekonomi antara pedagang dan pembeli yang terjadi. Menurut Hamid (1994: 90-91), dalam observasinya mengenai pedagang kaki lima di kota Jakarta dan Surabaya, ditemukan adanya kecenderungan bahwa di setiap berdirinya gedung bertingkat dan taman-taman kota, dapat dipastikan sejumlah pedagang kaki lima berderetan di sepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan kantor tersebut dan orang-orang yang melewati jalan-jalan kota. Akibat dari kondisi diatas adalah semakin banyak munculnya masalah-masalah di perkotaan, terutama masalah pemanfaatan dan penataan ruang yang disebabkan karena keberadaan pedagang kaki lima. Masalah tersebut diantaranya adalah :

1. Menciptakan kawasan-kawasan kumuh yang seringkali dijumpai di daerah-daerah pinggiran sungai karena terdapat tempat tinggal para pedagang sektor informal;
2. Kualitas lingkungan kawasan mengalami penurunan karena banyaknya limbah dan sisa pembuangan dari sampah pedagang kaki lima;

3. Secara tidak langsung menghambat proses penataan kota yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, mengingat banyaknya para pedagang yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota.
4. Kemacetan lalu lintas kota yang disebabkan banyaknya pedagang kaki lima yang melebar ke bahu jalan dan jalan raya yang menyebabkan pengurangan kapasitas jalan yang ada.
5. Estetika dan keindahan kota yang terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di ruang publik, baik di taman kota, pedestrian ways, maupun tempat-tempat publik lainnya.

Kondisi tersebut sangat tidak sesuai dengan tatanan fisik lingkungan perkotaan, sehingga perlu penataan elemen-elemen yang serasi dan sesuai serta persyaratan perencanaan sehingga akan tercipta ruang kota yang sesuai dan serasi dengan lingkungan perkotaan.

2.4 Tinjauan Aspek Penentu Lokasi PKL

Untuk mengetahui aspek penentu dalam penentuan lokasi PKL maka berikut ini adalah pembahasan teori-teori perdagangan retail dari beberapa para ahli:

Pengecer atau yang disebut perdagangan *ritel*, bahkan disingkat menjadi bisnis *ritel*, menurut Hendri Ma'ruf (2005) adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Sedangkan menurut Kotler (1996), perdagangan eceran adalah semua perdagangan yang berkenaan dengan penjualan barang-barang dan jasa-jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan penggunaan bisnis. Perdagangan eceran juga sering diutarakan sebagai *the sale of goods in small quantities*. Hal ini sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk konsumen akhir seperti kebutuhan rumah tangga untuk langsung dikonsumsi (J.A. Sinungan dalam Prisma, 1987). Bentuk-bentuk eceran sangat beragam dan bentuk-bentuk baru terus bermunculan. Diantaranya adalah pengecer toko (*store retailers*), penjualan eceran tanpa toko (*non-store retailers*) dan berbagai organisasi eceran (*retail organizations*) (Kotler, 2002).

Menurut Rahmawaty (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi menarik tidaknya suatu lokasi retail adalah aksesibilitas, keuntungan lokasi, memiliki sarana dan prasarana pendukung, memiliki daya tarik, berada pada area keramaian.

Aksesibilitas yang dimaksud terbagi menjadi dua pengertian yaitu makro dan mikro, secara makro ritel akan mempertimbangkan hal-hal utama yang berkaitan dengan suatu area perdagangan dan hal tersebut akan dievaluasi secara simultan, seperti ruas jalan, kondisi jalan dan penghalang/barriers (misal sungai, gunung), sedangkan secara mikro ritel akan berkonsentrasi pada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal sekitar ritel, seperti visibilitas/jarak pandang, arus lalu lintas, lahan parkir dan jalan masuk/keluar. Sedangkan keuntungan lokasi yang dimaksud adalah lokasi retail harus meminimumkan biaya, berprinsip bahwa lokasi ritel akan selalu mendekati segmen sasarannya, ada juga pemilihan lokasi disejajarkan dengan ritel lain yang sejenis sehingga akan memunculkan keamanan, kesepakatan penutupan toko secara bersama dan sejenisnya.

Sementara itu, nilai lokasi pedagang kaki lima tergantung kepada faktor aksesibilitas, dekat dengan keramaian penduduk, dan dilalui jaringan jalan umum. (Heri, 1982 dalam Sundari, 1987). Agrumen ini juga mendukung pernyataan yang mengatakan bahwa PKL akan berlokasi di depan pertokoan yang memiliki aksesibilitas tinggi dan cenderung menempel pada induk kegiatan formal yang banyak mendatangkan pengunjung. Pemilihan lokasi ini disebabkan oleh keberadaan pertokoan yang dapat menarik pembeli, memberikan aksesibilitas tinggi melalui penciptaan *channel travel patterns*, serta akan menarik pertokoan lain untuk berlokasi. (Simmons dan Jones, 1990 dalam Surya 2006).

Waworoentoe (1973), juga menyebutkan bahwa pedagang kaki lima biasanya akan tumbuh berkembang pada ruang-ruang fungsional kota (pusat perdagangan/pusat perbelanjaan/pertokoan, pusat rekreasi/hiburan, pasar, terminal/pemberhentian kendaraan umum, pusat pendidikan, pusat pertokoan). Elemen yang berkaitan dengan segi kualitas fungsional yang berhubungan dalam menampung aktifitas perkotaan meliputi bangunan, ruang antara dan sekitar bangunan, jaringan transportasi dan komunikasi serta pelayanan. (Gusmulyadi, 1994).

Menurut Joedo (1997), penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atas pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama sepanjang hari.
- b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusatpusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.
- c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit.
- d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Mc Gee dan Yeung (1977), menyatakan bahwa pedagang kaki lima beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial. Dalam berlokasi, PKL pada umumnya berada di daerah-daerah yang paling menguntungkan di wilayah pusat kota yang penuh sesak (Bromley dalam Manning, 1996). Selain di daerah-daerah yang paling menguntungkan di pusat kota, dalam berdagang, PKL akan memilih tempat-tempat yang mudah dijangkau dan terlihat oleh konsumen. Shirvani (1985) menyebutkan bahwa dalam merancang suatu jalur pejalan kaki (pedestrian) diperlukan aktivitas atau kegiatan seperti pedagang eceran (PKL) yang dapat menghidupkan pedestrian tersebut. Hal itu dimaksudkan bahwa penempatan pedagang kaki lima di pedestrian atau trotoar akan menghidupkan suasana yang berarti pula lokasi yang dianggap menguntungkan bagi PKL ada pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau konsumen.

Di lihat dari faktor aksesibilitas, secara fisik keberadaan ruang kota sangat dipengaruhi oleh jarak dan kemudahan pencapaian terhadap jenis dan kesempatan seseorang terhadap ruang tujuan, sehingga kemudahan pencapaian dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang kota. Dalam lingkup pusat kota hal tersebut sangat jelas melandasi alasan pengunjung untuk mengkonsumsi jasa sektor informal (Catanese, 1997 dalam Surya, 2006).

Dari penjelasan berbagai teori diatas, berikut ini adalah sintesa dari teori lokasi perdagangan *retail* (eceran).

Tabel 2.3 Kajian Teori Perdagangan *Retail* (Eceran) Menurut Beberapa Sumber

No	Sumber	Aspek Penentu Lokasi Perdagangan Retail (Eceran)
1	Rahmawaty, 2012	• Aksesibilitas (Makro: ruas jalan, kondisi jalan dan penghalang atau barriers misal sungai dan gunung; Mikro: visibilitas/jarak pandang, arus lalu lintas, lahan parkir dan jalan masuk/keluar) • Keuntungan lokasi (minimum biaya, mendekati segmen sasaran dan cenderung mengelompok untuk mendapatkan rasa aman bersama pedagang lain)
2	Heri, 1982 dalam Sundari, 1987	• Aksesibilitas • Dekat dengan keramaian penduduk • Dilalui jaringan jalan umum
3	Simmons dan Jones, 1990 dalam Surya 2006	• Aksesibilitas • Menempel pada induk kegiatan formal • Lokasi dapat mendatangkan banyak pengunjung • Ketersediaan moda transportasi
4	Waworoentoe, 1973	• Beraglomerasi dan berkembang di ruang fungsional kota (pusat keramaian)
5	Gusmulyadi, 1994	• Jenis bangunan • Ruang antara dan sekitar bangunan • Jaringan transportasi dan komunikasi serta pelayanan
6	Joedo, 1997	• Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama sepanjang hari • Terletak pada pusat-pusat perekonomian/non-ekonomi perkotaan namun sering dikunjungi orang dalam jumlah besar • Kemudahan berinteraksi dengan konsumen • Tidak memerlukan ketersediaan utilitas dan fasilitas pelayanan umum
7	Mc Gee dan	• Beraglomerasi pada simpul pedestrian dan pusat keramaian

No	Sumber	Aspek Penentu Lokasi Perdagangan Retail (Eceran)
	Yeung, 1977	kota atau daerah komersial • Strategis
8	Bromley dalam Manning, 1996	• Berada pada lokasi paling menguntungkan (pusat kota)
9	Catanese, 1997 dalam Surya, 2006	• Aksesibilitas jarak • Kemudahan pencapaian • Ketersediaan moda transportasi

Sumber : Hasil kajian literature, 2021

2.5 Kebijakan Penataan PKL

Kebijakan secara etimologi dapat diartikan sebagai tindakan untuk bertindak. Kebijakan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah Serangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana pelaksanaan kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan merupakan terjemahan dari *policy* yang berarti suatu unit rencana yang dipergunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan khususnya di dalam bidang politik, ekonomi, bisnis dan lain-lain.

Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Lebih lanjut Mustopadidjaja memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam :

- Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan.
- Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Anderson mengklasifikasikan kebijakan, *policy*, menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang seharusnya dikerjakan oleh

pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Menurut Anderson, kebijakan politik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan public :

- a. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi.
- b. Kedua, kebijakan merupakan pola-model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
- c. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang secara pemerintah pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
- d. Keempat, bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
- e. Kelima, kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Sedangkan tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah

Dirumuskan oleh James E. Anderson mengenai kebijakan sebagai: perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi Pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan. Dalam ilmu-ilmu sosial, kebijakan diartikan sebagai dasar-dasar haluan untuk menentukan langkahlangkah atau tindakan-tindakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan daerah adalah suatu keputusan dari pemerintah daerah untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Saat ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Dalam kaitan tersebut dapat dipahami apabila kebijakan seringkali diberikan makna suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Dijelaskan oleh Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara

tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya, di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan ada 2 (dua) macam, yaitu tindakan yang ingin di lakukan Pemerintah dan yang tidak ingin dilakukan pemerintah.

Dirumuskan oleh pakar pemerintahan yang lain, yaitu W.I Jenkins bahwa kebijakan Pemerintah adalah : Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Ada 3 (tiga) tahap yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, yaitu :

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini perlu diadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, pusat perhatiannya, stratifikasi sosial, pusat kekuasaan maupun saluran komunikasi. Dari hasil identifikasi ini kemudian disusun suatu perencanaan dengan berorientasi jauh kedepan, sehingga dapat dijadikan bahan acuan untuk pelaksanaan, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.

b. Penerapan atau Pelaksanaan

Pada tahap ini, selain melaksanakan hal hal yang telah dibuat dalam perencanaan, juga perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.

c. Evaluasi

Pada tahap ini diadakan analisis terhadap efek dari pelaksanaan. Kiranya sulit membayangkan keberhasilan dari pelaksanaan apabila tidak diadakan evaluasi terhadap apa yang telah dicapai. Sebab dalam pelaksanaan tidaklah

cukup apabila hanya dilandasi itikad baik dan semangat saja. Usaha lainnya sangat diperlukan untuk mengidentifikasi apa yang mundur, dan apa yang telah merosot. Hal-hal tersebut memerlukan pengadaan, pembetulan, penambahan, pelancaran dan peningkatan secara proporsional.

Konsep Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus melalui tahap-tahap tertentu. Dengan demikian untuk membuat kebijakan diperlukan suatu proses yang menyertainya. Dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab bahwa membuat kebijakan Pemerintah (*Government Policy*) merupakan suatu proses pembuatan keputusan, karena kebijakan Pemerintah (*public policy*) itu merupakan pengambilan keputusan (*decision making*) dan pengambilan kebijakan (*policy making*) yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.

Dari beberapa literatur hukum administrasi negara diterangkan bahwa kebijakan negara dapat berbentuk kebijakan yang positif dan kebijakan yang negatif. Dalam bentuk positifnya, kebijakan negara mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk negatifnya, kebijakan negara dapat meliputi keputusan-keputusan untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah pemerintah. Pada umumnya kebijakan negara dalam bentuk positif didasarkan pada peraturan dan kewenangan tertentu dan memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan serta memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.

Dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab kategori dari hakikat kebijakan negara sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu dapat diperinci ke dalam beberapa kategori, antara lain sebagai berikut :

a. *Policy Demands* (Tuntutan kebijakan)

Tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau

sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu. Tuntutan-tuntutan ini bervariasi, mulai dari desakan umum agar Pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan kongkrit tertentu terhadap sesuatu masalah yang terjadi di masyarakat.

b. *Policy Decisions* (Keputusan kebijakan)

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijaksanaan negara. Dalam hubungan ini termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, mencanangkan peraturan-peraturan administrasi, atau membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. *Policy Statement* (Pernyataan kebijakan)

Pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijaksanaan negara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah Ketetapan-Ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, peraturan-peraturan administratif, keputusan-keputusan peradilan, maupun pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato para pejabat Pemerintah yang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah serta apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

d. *Policy Outputs* (Keluaran kebijakan)

Merupakan wujud kebijakan negara yang dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijaksanaan. Keluaran-keluaran kebijaksanaan ini menyangkut apa yang dikerjakan oleh Pemerintah, yang dapat dibedakan dari apa yang ingin dibedakan Pemerintahan.

e. *Policy Outcomes* (Hasil Akhir kebijakan)

Akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu Mengenai Upaya Penataan PKL

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Septian Eko Wibisono dengan judul Arahan Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya, diterbitkan pada tahun 2015.
2. Muh. Mardiyanshar Nasta dengan judul Analisis Faktor Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pantai Losari), diterbitkan pada tahun 2017.
3. Ambarwaty Srie Hany dengan judul Studi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang Di Kota Salatiga, diterbitkan pada tahun 2003.

Adapun gambaran detail tiap penelitian dapat di lihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tujuan	Variabel	Indikator	Teknik Analisis	Persamaan	Perbedaan	Output
1	Arahan penataan kegiatan pedagang kaki lima (pkl) di kawasan gelora sepuluh nopember surabaya	- Mengidentifikasi karakteristik pedagang kaki lima di sekitar kawasan Gelora Sepuluh Nopember - Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL Gelora Sepuluh Nopember - Merumuskan arahan penataan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Gelora Sepuluh Nopember	- Harga lahan - Status lahan - Tingkat pendapatan pedagang - Penyuluhan tentang tempat, waktu, dan sarana usahah - Komunikasi antar stakholder	- Penilaian suatu lahan - Kondisi lahan yang digunakan - Hasil dari yang diperoleh dari berdagang dilokasi yang strategis - Tidak adanya kominikasi antar stakholder	<i>Statistic Descriptive</i> - Analisis Delphi - Analisis Deskriptif Kuantitatif	Persamaan dari penelitian ini terfokus untuk mengetahui karakteristik PKL serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Penataan lokasi PKL	Teknik analisi yang digunakan	- Karakteristik PKL kawasan Gelora Sepuluh Nopember - Faktor yang berpengaruh terhadap penataan PKL - Arahan Penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember
2	Analisis faktor pemilihan	Menemukenali karakteristik aktivitas dan ruang	Karakteristik Aktivitas Pedagang	- Lokasi beraktivitas - Jenis	Analisis deskriptif kualitatif	Indikator yang digunakan	Penelitian penulis membahas	Menjabarkan hasil observasi lapangan/wawanca

No	Judul	Tujuan	Variabel	Indikator	Teknik Analisis	Persamaan	Perbedaan	Output
	lokasi usaha pedagang kaki lima (studi kasus: Pantai Losari)	usaha pedagang kaki lima di sepanjang Anjungan Pantai Losari kota Makassar. - Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam memilih lokasi berdagang di sepanjang Anjungan Pantai Losari. - Mengkaji kebijakan pemerintah kota Makassar dalam penataan dan penanganan pedagang kaki lima di sepanjang Anjungan Pantai Losari kota Makassar	Kaki Lima Faktor penentu pemilihan lokasi	Dagangan - Sarana Fisik Berdagang - Pola Pelayanan (waktu dan sifat layanan) - Pola Penyebaran - Tempat Keramaian - Kekerabatan - Akses - Retrebusi - Rivalry - Berkelompok	dan kuantitatif Distribusi Frekuensi Tabulasi silang		tentang penentuan lokasi sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang analisis faktor pemilihan lokasi.	ra dan kuesioner terhadap karakteristik aktivitas pedagang kaki lima di sepanjang anjungan Pantai Losari Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai factor-faktor penentu pedagang kaki lima dalam memilih lokasi berdagang di sepanjang anjungan Pantai Losari

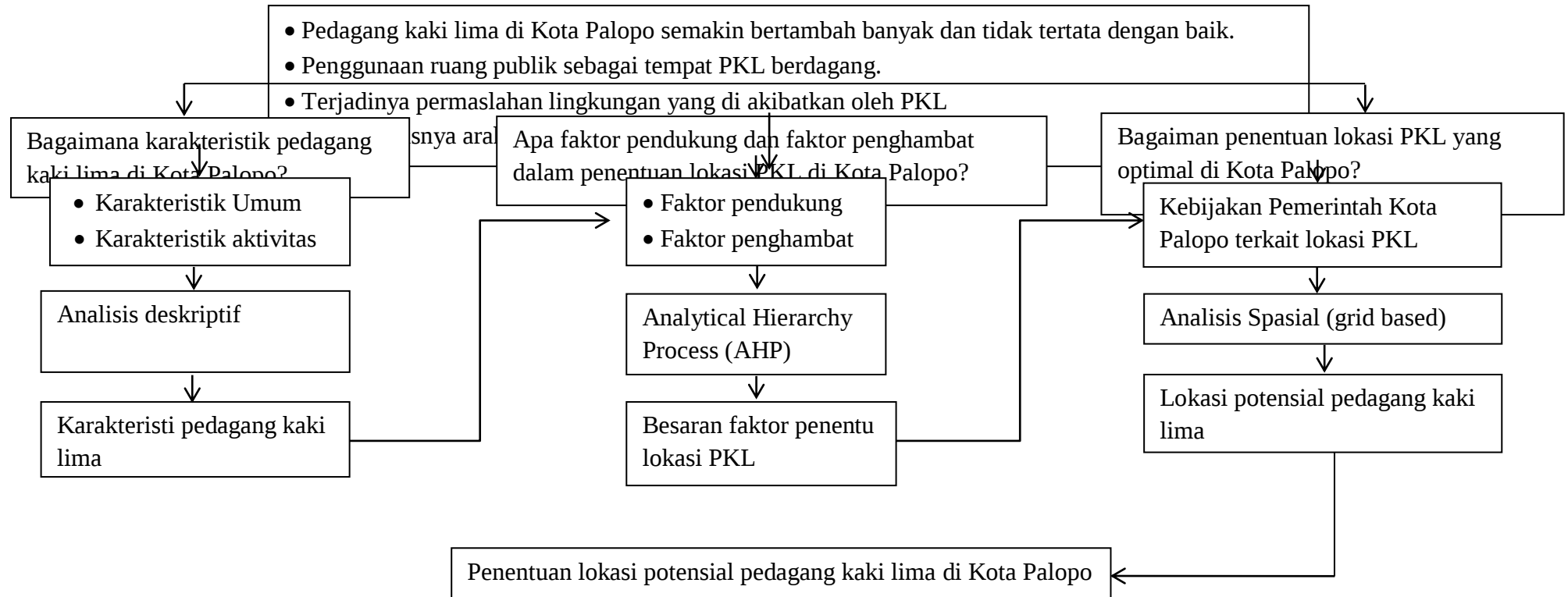
No	Judul	Tujuan	Variabel	Indikator	Teknik Analisis	Persamaan	Perbedaan	Output
3	Studi aktivitas pedagang kaki lima dalam pemanfaatan ruang di Kota Salatiga	- Mengetahui karakteristik perilaku PKL dalam berjualan dan dalam pemanfaatan ruang kota sebagai lokasi usaha - Mengetahui persepsi Masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL - Mengetahui hubungan antara kondisi PKL dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas tersebut	- Aktivitas usaha - Lokasi aktivitas - Jarak lokasi - Persepsi terhadap keberadaan aktivitas PKL - Perilaku PKL - Persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL	- Jenis dagangan - Bentuk sarana perdagangan - Lama aktivitas - Pola penyebaran (mengelompok dengan sejenis/jenis lain) - Lokasi ruang - Status ruang - Jenis ruang - Luas ruang - Alasan pemilihan lokasi - Perilaku dalam penggunaan tempat usaha - Jarak Lokasi usaha dengan aktivitas masyarakat - Jarak lokasi usaha dengan tempat tinggal	- Deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi - Deskriptif kuantitatif dengandistri busi frekuensi - Deskriptif kuantitatif dengan <i>crostabulation</i> - Deskriptif kuantitatif dengandistri busi frekuensi	Variabel serta indikator yang digunakan	Teknik analisis yang digunakan	- karakteristik perilaku PKL dalam berjualan dan dalam pemanfaatan ruang. - Memberikan gambaran terhadap persepsi Masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL - Memberikan gambaran terhadap hubungan antara kondisi PKL dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas

No	Judul	Tujuan	Variabel	Indikator	Teknik Analisis	Persamaan	Perbedaan	Output
				PKL • Jarak lokasi usaha dengan sumber bahan baku • Jarak lokasi usaha dengan permukiman terdekat • Alasan berbelanja di PKL • Manfaat PKL • Gangguan adanya aktivitas PKL • Penempatan lokasi PKL • Pengelompokkan PKL • Perlu tidaknya penentuan lokasi PKL di Kota Salatiga				

Sumber: Penulis, 2021

2.7 Kerangka Pikir Penelitian

Adapun kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.5 Kerangka pikir penelitian

Sumber: Penulis, 2021

